

**Analisis Rasio Efektifitas terhadap APBD pada Kantor Desa
Labokong Kecamatan Donri – Donri Kabupaten Soppeng 2017 –
2020**

Riski Nadia Putri, Syamsu Alam, Andi Aswan

Universitas Hasanuddin
riskinadia19@gmail.com

ABSTRCT

This study aims to test and analyze the effectiveness ratio of the APBD at the Labokong Village Office, Donri-donri District, Soppeng Regency in 2017-2020. The type of research used in this research is quantitative. The data processed is the financial report of the regional budget (APBD) from 2017 to 2020. The data analysis method used in this study is the effectiveness ratio. The results showed that in general the financial performance of the Labokong Village government, Donri-donri district, District. Soppeng is not effective yet.

Keywords: financial performance; effectiveness ratio

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan Untuk Menguji dan Menganalisis Rasio Efektivitas Terhadap APBD Pada Kantor Desa Labokong Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng Tahun 2017-2020. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Data yang diolah adalah laporan keuangan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dari tahun 2017 sampai tahun 2020. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rasio efektivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kinerja keuangan pemerintah Desa Labokong kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng belum efektif.

Kata kunci : kinerja keuangan; Rasio efektivitas

PENDAHULUAN

Ekonomi merupakan penunjang pertumbuhan dan pembangunan suatu Negara. suatu Negara dikatakan berkembang dan maju apabila daerah-daerah yang ada dinegara tersebut memiliki pertumbuhan ekonomi yang stabil. Pengelolaan keuangan anggaran pendapatan belanja daerah yang baik sangat berpengaruh terhadap suatu kemajuan daerah. pengelolaan pendapatan daerah mampu berkembang atau tidaknya, tergantung pada tata cara pengelolaan keuangannya.

Lahirnya Undang-Undang (UU) No. Pada tahun 2008, ada tiga undang-undang tentang pemerintah daerah (Pemda) dan UU No. 3. Keputusan Nomor 33 Tahun 2008 tentang Perimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi titik tolak otonomi daerah. Otonomi daerah (otoda) adalah kekuasaan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan undang-undang, menurut keinginan masyarakat, dan menurut keinginannya sendiri. Sementara itu, perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah didasarkan pada pembagian kewajiban dan kewenangan, serta sesuai dengan potensi, kebutuhan dan kebutuhan daerah, serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil dan merata. transparan, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangan.

Adanya undang-undang ini memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan segala urusan pemerintahan termasuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi, sehingga mendorong pemerintah daerah untuk lebih mengembangkan potensinya untuk membangun dan mengembangkan daerahnya. Padahal, dasar pertimbangan pelaksanaan otonomi daerah adalah pembangunan di dalam negeri, yang menunjukkan bahwa masyarakat harus terbuka dan mandiri (*desentralisasi*).

KAJIAN PUSTAKA

Manajemen Keuangan

Keuangan adalah studi tentang dana internal perusahaan, yang merupakan area fungsional bisnis yang bertanggung jawab untuk

menerima dana, mengelola dana, dan memilih cara lain untuk menggunakan dana dengan sebaik-baiknya

Menurut Anton Athoillah (2010:13) dalam bukunya yang berjudul "dasar-dasar manajemen" beliau mengatakan bahwa manajemen berasal dari kata "to manage" yang berarti organisasi, manajemen dan manajemen. Dari pengertian tersebut, pengertian pengelolaan harus mencakup unsur kegiatan pengelolaan. Oleh karena itu timbul pertanyaan apa yang dikelola, bagaimana mengelola, apa yang dikelola dan siapa pengelolanya

Menurut V.Sujarweni (2021:9-10) dalam bukunya "Manajemen Keuangan, Teori Terapan dan Hasil Penelitian", manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pembinaan dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan perusahaan. Tujuan, perusahaan harus mampu mengendalikan dan mengendalikan kegiatan operasi perusahaan dengan memanfaatkan hak, tanggung jawab, dan tanggung jawab internal perusahaan untuk mencapai tujuan tersebut.

Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah gambaran neraca/laporan keuangan, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal perusahaan pada waktu tertentu. Investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditur komersial lainnya, pelanggan, pemerintah dan masyarakat membutuhkan laporan keuangan ini sebagai bahan berita untuk membuat keputusan yang sesuai dengan kepentingan mereka sendiri.(Pramono, 2014)

Farid dan Siswanto menyatakan dalam buku Irham Fahmi (2015:21) bahwa "laporan keuangan adalah informasi yang diperlukan untuk membantu pengguna membuat keputusan ekonomi yang bersifat keuangan"

Dalam buku Munawir, Irham Fahmi (2015:21) mengatakan bahwa "laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi tentang status keuangan dan pencapaian perusahaan terkait", sehingga laporan keuangan diharapkan dapat membantu pengguna dalam mengambil keputusan keuangan.

Analisis Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2019:66-67) dalam bukunya “Analisis Laporan Keuangan”, agar laporan keuangan lebih bermakna, sehingga semua pihak dapat memahami dan mengerti, laporan keuangan harus dianalisis. Bagi pemilik dan manajemen, tujuan utama dari analisis laporan keuangan adalah untuk dapat mengetahui keadaan keuangan perusahaan saat ini. Dengan memahami situasi keuangan dan melakukan analisis laporan keuangan secara mendalam, sehingga dapat dilihat apakah perusahaan dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.

Dengan memahami situasi keuangan, dapat merencanakan dan membuat keputusan yang tepat tentang pekerjaan di masa depan. Rencanakan ke depan dengan menutupi kelemahan yang ada, mempertahankan posisi sesuai dengan harapan, dan bekerja untuk meningkatkan kekuatan yang diperoleh selama ini. Analisis laporan keuangan perlu dilakukan secara cermat dengan menggunakan metode dan teknik analisis yang tepat agar hasil yang diharapkan benar-benar tepat. Kesalahan dalam memasukkan angka atau rumus akan mengakibatkan hasil yang tidak akurat. Kemudian, analisis dan interpretasi hasil perhitungan tersebut untuk memahami situasi keuangan yang sebenarnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Mahsun, Firma, dan Heribertus (2011:81), anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah daftar satu tahun yang memuat informasi rinci tentang pendapatan daerah dan belanja/belanja daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dan berlangsung selama satu tahun, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, pengertian pendapatan dan belanja daerah anggaran adalah pembahasan tahunan pemerintah daerah oleh pemerintah daerah dan DPRD dan menyepakati rencana keuangan yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Dalam penyusunan proyek APBD, kepala daerah menetapkan prioritas anggaran dan plafon sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja kabupaten, kemudian kepala satuan kerja kabupaten menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja kabupaten dengan suatu pendekatan sesuai dengan hasil kerja yang akan dicapai, kemudian diserahkan kepada pejabat pengelola daerah keuangan sebagai bahan penyusunan peraturan daerah tentang APBD untuk tahun berikutnya (Pasal 180)

Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah (Perda) tentang APBD beserta dokumen pendukungnya kepada DPRD, kemudian APBD Perda dibahas oleh pemerintah daerah bersama DPRD sejalan dengan kebijakan APBD secara keseluruhan serta prioritas anggaran dan plafon anggaran. Berdasarkan persetujuan DPRD, kepala daerah menyusun rancangan peraturan kepala daerah tentang pengembangan APBD dan rancangan dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (Pasal 181).

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini terletak di Desa Labokong, Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng

Populasi yang akan digunakan untuk penelitian adalah laporan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kantor Desa Labokong Kabupaten Soppeng.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di kantor Desa Labokong Kabupaten Soppeng tahun 2017-2020.

METODE ANALISIS

Rasio efektivitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah untuk mencapai pendapatan daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan sesuai dengan potensi daerah yang sebenarnya. Dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Trianto, 2016):

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Target penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

Kriteria rasio efektivitas PAD menurut mahsum (2009) adalah:

- a) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti tidak efektif
- b) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti efektivitas berimbang
- c) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti efektif

HASIL PENELITIAN

Analisis kinerja keuangan kantor Desa Labokong Kecamatan donri-donri Kabupaten Soppeng dalam penelitian ini merupakan proses evaluasi tingkat kemajuan pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan bidang keuangan. Rasio yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis kinerja keuangan kantor Desa Labokong kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng yaitu Rasio efektivitas.

Tabel 1. Laporan Keuangan Anggaran PEndapatan dan Belanja Desa (APBD) Pada Kantor Desa Labokong Kecamatan Donri - Donri Kabupaten Soppeng

Tahun	Realisasi	Target
2017	Rp. 2.453.377.043	Rp.2.422.091.768
2018	Rp. 2.550.188.903	Rp. 2.698.826.393
2019	Rp.2.338.460.031	Rp. 2.415.358.640
2020	RP. 2.429.812.656	Rp. 2.538.768.041

Sumber: Data Diolah

Perhitungan rasio efektivitas kantor Desa Labokong kecamatan donri-donri kabupaten soppeng tahun anggaran 2017-2020 sebagai berikut:

Tabel 2. Rasio Efektivitas Kantor Desa Labokong Kecamatan Donri - Donri Kabupaten Soppeng

Tahun	Realisasi PAD	Target PAD	Rasio efektivitas
2017	Rp. 2.453.377.043	Rp.2.422.091.768	101%
2018	Rp. 2.550.188.903	Rp.2.698.826.393	94 %
2019	Rp.2.338.460.031	Rp.2.415.358.640	97%
2020	RP.2.429.812.656	Rp.2.538.768.041	96%

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan tabel diatas Rasio efektivitas dianggap baik apabila rasio ini mencapai angka 100%. Pada tahun 2017 menunjukkan angka yaitu 101% berarti tahun 2017 telah sesuai dengan target. namun pada tahun 2018, 2019 dan 2020 mengalami penurunan yaitu 94%,97% dan 96%. Jika dilihat secara umum, rata-rata rasio efektivitas ini tidak efektif. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata rasio ini hanya mencapai 97%.

PEMBAHASAN

Laporan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kantor Desa Labokong Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng menunjukkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Pada tahun 2017, anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp. 2.453.377.043. Pada tahun 2018, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ditingkatkan menjadi Rp.2.550.188.903. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019 turun menjadi Rp2.338.460.031. Kemudian pada tahun 2020, Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dinaikkan menjadi Rp. 2.429.812.656.

Target PAD anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kantor Desa Labokong Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng dari tahun 2017-2020 mengalami penurunan dan kenaikan. Pada tahun 2017 target PAD anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) sebesar Rp. 2.422.091.768. pada tahun 2018 target PAD anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) meningkat sebesar Rp.2.698.826.393. namun pada tahun 2019 mengalami penurunan yaitu Rp.2.415.358.640. kemudian pada tahun 2020 meningkat sebesar Rp. 2.538.768.041.

Berdasarkan perhitungan dari rasio efektivitas dapat diketahui bahwa rasio efektivitas anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) keuangan Kantor Desa Labokong Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng pada tahun 2017 sebesar 101% tahun 2018 sebesar 94%. Tahun 2019 sebesar 97%. Tahun 2020 sebesar 96%. Efektivitas kinerja keuangan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kantor Desa Labokong Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng untuk tahun 2017 dikategorikan efektif. Tahun 2018 berjalan tidak efektif karena nilai yang diperoleh dibawah 100%. Kemudian tahun 2019 dan 2020 juga tidak berjalan efektif karena dibawah 100%.

Hal ini menunjukkan bahwa rasio efektivitas Kantor Desa Labokong Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng tergolong fluktuatif dari tahun ke tahun dalam merealisasikan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

PENUTUP

Kesimpulan

Rasio efektivitas anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kantor Desa Labokong Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng jika dilihat dari rasio efektivitas dikategorikan tidak efektif, karena rata-rata rasio efektivitasnya dari tahun 2017-2020 di bawah 100% yaitu 97%. Rinciannya adalah sebagai berikut:

Tahun 2017 sebesar 101%, tahun 2018 sebesar 94%, tahun 2019 sebesar 97%, dan tahun 2020 sebesar 96%.

Saran

- a) Pemerintah Desa sebaiknya lebih mengoptimalkan dalam mengelola dan meningkatkan Alokasi Dana Desa (ADD) dari tahun ke tahun. Pemerintah Desa juga perlu meningkatkan realisasi Alokasi Belanja Dana Desa (ADD) sehingga dapat pada hal-hal yang bermanfaat.
- b) mengoptimalkan fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) guna membantu meningkatkan efektifitas pendapatan Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, H. (2013). *Manajemen Keuangan*. BPFE-YOGYAKARTA.
- Athoillah, A. (2010). *Dasar-Dasar Manajemen*. CV Pustaka Setia.
- D. Kartika, I. K. (2017). *Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, Dan Rasio Efisiensi PAD Pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi*. 5(9), 1-58.
- Darise, N. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah*. PT Indeks.
- Fahmi, I. (2011). *Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi*. Alfabeta,cv.
- Fahmi, I. (2014). *Manajemen Teori,Kasus, dan Solusi*. Alfabeta.
- Fahmi, I. (2015). *pengantar manajemen keuangan*.Alfabeta
- Jumingan. (2011). *Analisis Laporan Keuangan*. PT Bumi Aksara.
- Kasmir. (2010). *Pengantar Manajemen Keuangan*. Kencana Prenada Media Grup.
- Kasmir. (2019). *Analisis Laporan Keuangan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Liantino, W. (2018). *Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah (BPPKAD) Di Kota Surakarta*.
- Musthafa. (2017). *Manajemen Keuangan*. CV.Andi Offset.
- Pramono, J. (2014). *Jurnal Ilmiah Among Makarti*, 7, 83-112.
- Renyowijoyo, M. (2008). *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*. Mitra Wacana Media.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian*. Alfabeta.
- Sujarweni, V. wiratna. (2017). *Analisis Laporan Keuangan Teori,Aplikasi, dan Hasil Penelitian*. Pustaka Bara Press.
- Sujarweni, V. wiratna. (2021). *Manajemen Keuangan Teori Aplikasi Dan Hasil Penelitian*. Pustaka Bara Press.

Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal

Vol 6 No 1 (2024) 960-969 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691
DOI: 10.47476/reslaj.v6i1.4519

- Trianto, A. (2016). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota Palembang. *Akuisisi: Jurnal Akuntansi*, 12(1), 65–77. <https://doi.org/10.24127/akuisisi.v12i1.92>
- Wijaya, D. (2018). *akuntansi desa*.